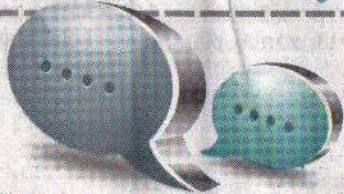
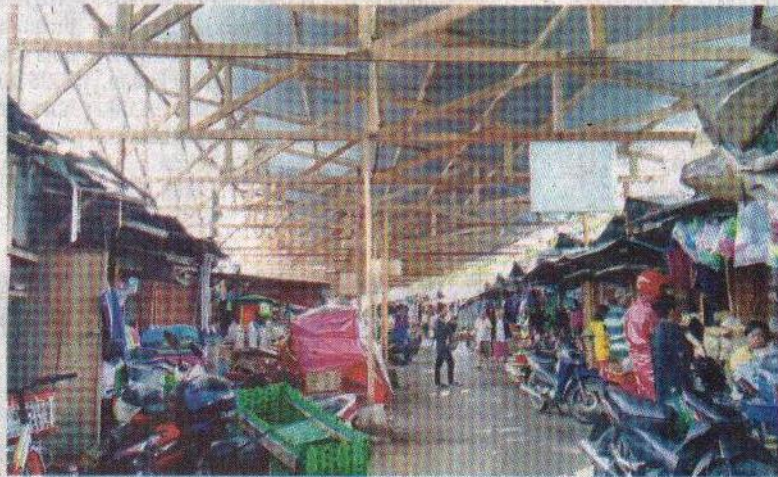


## Alasan Mengadukan Pemkab Sukoharjo



- ✓ Pemkab dinilai tidak pro kepada pedagang.
- ✓ Proses audit Pasar Ir. Soekarno oleh BPK kembali mundur.
- ✓ Pemkab tak kunjung menyelesaikan proyek pembangunan Pasar Ir. Soekarno.
- ✓ Dengan mundurnya proses audit, anggaran Rp15,2 miliar dalam APBD 2014 untuk merampungkan proyek pasar belum bisa digunakan.



Espos/Kurniawan

Sejumlah pedagang Pasar Ir. Soekarno Sukoharjo beraktivitas di pasar darurat belum lama ini.

### ▶ PASAR IR. SOEKARNO

## Pedagang Ancam Adukan Pemkab ke Komnas HAM

SUKOHARJO—Pedagang Pasar Ir. Soekarno Sukoharjo berencana mengadukan Pemkab Sukoharjo kepada Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) menyusul berlarut-larutnya proyek pasar.

Ketua Himpunan Pedagang Pasar Kota Sukoharjo, Fajar Purwanto, mengaku sedang menunggu waktu yang tepat untuk mengadukan masalah Pasar Ir. Soekarno



<http://bit.ly/1cQPQZF>

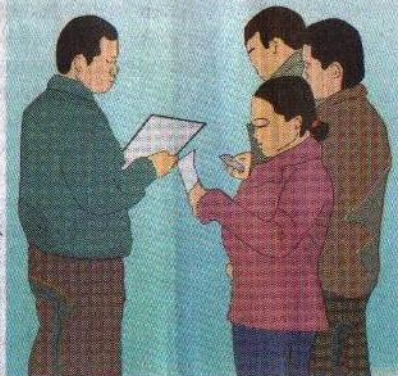
kepada Komnas HAM. Perwakilan pedagang akan mendatangi langsung komisioner Komnas HAM di Jakarta.

"Kami masih mencari momentum untuk mengadu kepada Komnas HAM. Nanti kami akan datang langsung Komnas HAM di Jakarta," ujarnya,

Sabtu (4/1).

Bersambung ke Hal. XI Kol. 4

Grafis: Rahmanto Iswahyudi



Sumber: Hasil wawancara

### Pedagang Ancam ..... Sambungan dari Hal. Soloraya

"Sekalian untuk melaporkan masalah kami kepada Menteri Perdagangan [Mendag] dan Menteri Dalam Negeri [Mendagri]," imbuhnya.

Wanto panggilan akrabnya, juga akan menanyakan ihwal Pasar Ir. Soekarno kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasalnya, sebelumnya pedagang sudah mengadukan ihwal proyek pasar kepada KPK. "Nanti sekalian akan kami tanyakan KPK," imbuhnya

Pedagang menilai, selama ini Pemkab tidak pro kepada mereka. Bahkan pedagang mengaku sering sakit hati kepada Pemkab lantaran tidak kunjung menyelesaikan bangunan Pasar Ir. Soekarno.

Banyak janji dan pernyataan pejabat Pemkab yang tidak sesuai kenyataan. Contoh terbaru mundurnya proses audit Pasar Ir. Soekarno oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Tengah (Jateng) akhir tahun lalu. Padahal sebelumnya Pemkab menyatakan proses audit tersebut akan berakhir pada Desember 2013.

Namun hingga Januari 2014 ini tim BPK belum merampungkan proses audit. Padahal hasil audit BPK tersebut merupakan syarat wajib untuk penyelesaian Pasar Ir. Soekarno pada 2014. Hasil audit BPK akan jadi pegangan Pemkab untuk melanjutkan proyek pasar.

Terpisah, pengendali teknis audit BPK atas belanja daerah Kabupaten Sukoharjo, Chairil Anwar Lubis, menyatakan proses audit lanjutan terhadap Pasar Ir. Soekarno mulai bulan ini melibatkan tim teknis dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta. Pemeriksaan lanjutan ini bersifat pendalaman teknis atas pemeriksaan pada November-Desember 2013.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Sukoharjo, Agus Santosa, saat dihubungi *Espos*, Minggu (5/1), mengatakan pedagang hendaknya bersabar. Pasalnya, Pemkab Sukoharjo juga masih menunggu hasil audit dari BPK. (Kurniawan/Ivan Andimuhtarom)